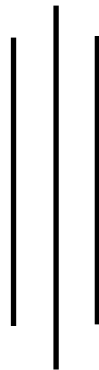




**RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang mempunyai Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, Perdagangan dan Perindustriandi wilayah Kota Pematangsiantar. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar berisi kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar 2023 - 2027, Dokumen RKPD, Renja Provinsi dan Renja Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan koperasi, perdagangan dan industri. Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil atau capaian dari program kegiatan serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dalam perkembangannya dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditingkatkan dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2023. Pembangunan koperasi, perdagangan dan industri di Kota Pematangsiantar dilaksanakan berdasar pada Visi Misi Walikota Pematangsiantar yang mengacu pada RKPD dan Renstra. Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis tentang koperasi, perdagangan dan industri yang ada di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi bahan Penyempurnaan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 menjadi Rancangan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahdan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahdan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahdan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 ke depan.

Pematangsiantar, Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kota Pematangsiantar



**HERBET ARUAN, S.Pd., MH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19710215 199305 1 001**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	34
2.4. Review Terhadap RKPD.....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	38
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>47</b>
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	51
3.3 Program dan Kegiatan .....	53
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>65</b>
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan RKPD. Penyusunan Rancangan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023 Kota Pematangsiantar belum memiliki RPJMD dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengamanatkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi dan menekankan penyusunan dokumen perencanaan pasca pilkada seterentak mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak. RKPD sebagai cikal bakal dokumen RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan RKPD;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Dari keseluruhan tahapan penyusunan RKPD tersebut, dokumen ini merupakan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023.



Tahapan persiapan telah dilakukan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya disusun RKPD ini untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1. MAKSUD**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai bahan/ masukan bagi penyusunan Renja dan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023. Pembahasan Renja dan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dilakukan melalui Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya, RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar.

### **1.2.2. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar ini untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi misi Wali Kota Pematangsiantar yang terdapat pada RPJMD.

## **1.3. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
  19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;  
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032;
  21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**



Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota  
Pematangsiantar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA PERANGKAT  
DAERAH tahun lalu dalam capaian RENSTRA  
PERANGKAT DAERAH
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5 Penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB IV : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dalam memberikan pelayanan kepada para pengusaha Industri Kecil, menengah, dan industri besar banyak mengalami hambatan – hambatan dan untuk menyelesaikan hambatan – hambatan tersebut diselesaikan atau dilaksanakan dengan melalui pendekatan dan kebijakan – kebijakan yang turut melibatkan Pelaku Usaha, masyarakat dan Instansi terkait, kemudian hambatan – hambatan tersebut dijadikan sebagai pendorong dan peluang untuk mencapai realisasi program yang dicanangkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

##### **2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021**

Evaluasi Pelaksanaan Renja dilakukan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2021.

A. Realisasi fisik dan keuangan dari program /kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2021 adalah :

**TABEL REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA  
DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	SILPA	%
					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>7.887.690.746</b>	<b>6.778.291.174</b>	<b>571.963.972</b>	<b>85,94</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>6.539.894.875</b>	<b>5.654.549.854</b>	<b>347.909.421</b>	<b>86,46</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>41.655.193</b>	<b>33.050.500</b>	<b>8.604.693</b>	<b>79,34</b>
2	17	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	26.839.524	23.115.500	3.724.024	86,12
2	17	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	14.815.669	9.935.000	4.880.669	67,06
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.915.879.433</b>	<b>4.685.673.723</b>	<b>230.205.710</b>	<b>95,32</b>
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	4.890.359.143	4.662.843.523	227.515.620	95,35
2	17	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DAU	25.520.290	22.830.200	2.690.090	89,46
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.05</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>537.435.600</b>	<b>497.606.420</b>	<b>39.829.180</b>	<b>92,59</b>
2	17	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DBH-CHT	537.435.600	497.606.420	39.829.180	92,59
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>456.683.403</b>	<b>372.941.220</b>	<b>83.742.183</b>	<b>81,66</b>
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	10.049.295	9.037.960	1.011.335	89,94

2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	201.986.712	183.181.200	18.805.512	90,69
2	17	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	11.487.196	7.858.000	3.629.196	68,41
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	13.200.000	7.390.000	5.810.000	55,98
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	57.982.200	53.940.000	4.042.200	93,03
2	17	1	02.06	9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	161.978.000	111.534.060	50.443.940	68,86
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>315.051.246</b>	<b>296.478.463</b>	<b>18.572.783</b>	<b>94,10</b>
2	17	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	5.347.600	5.347.600	-	100,00
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	35.685.120	27.957.863	7.727.257	78,35
2	17	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	27.800.000	27.800.000	-	100,00
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	246.218.526	235.373.000	10.845.526	95,60
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>273.190.000</b>	<b>266.405.948</b>	<b>6.784.052</b>	<b>97,52</b>
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	73.190.000	68.443.848	4.746.152	93,52
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	200.000.000	197.962.100	2.037.900	98,98
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>71.212.303</b>	<b>45.000.100</b>	<b>26.212.203</b>	<b>63</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>02.01</b>		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, TeraUlang dan Pengawasan</b>		<b>71.212.303</b>	<b>45.000.100</b>	<b>26.212.203</b>	<b>63,19</b>
3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, TeraUlang	DAU	20.867.030	6.711.100	14.155.930	32,16
3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	DAU	50.345.273	38.289.000	12.056.273	76,05
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>56.169.302</b>	<b>46.670.302</b>	<b>9.499.000</b>	<b>83,09</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>56.169.302</b>	<b>46.670.302</b>	<b>9.499.000</b>	<b>83,09</b>

2	17	3	02.01	1	Pengawasan Kekuatan,Kesehatan,Kemandirian,Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	56.169.302	46.670.302	9.499.000	83,09
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI</b>		<b>390.304.000</b>	<b>357.912.506</b>	<b>32.391.494</b>	<b>91,70</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>02.01</b>		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>390.304.000</b>	<b>357.912.506</b>	<b>32.391.494</b>	<b>91,70</b>
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK NON FISIK	390.304.000	357.912.506	32.391.494	91,70
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>31.109.530</b>	<b>28.692.600</b>	<b>2.416.930</b>	<b>92,23</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>31.109.530</b>	<b>28.692.600</b>	<b>2.416.930</b>	<b>92,23</b>
2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	DAU	31.109.530	28.692.600	2.416.930	92,23
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>71.970.741</b>	<b>45.476.220</b>	<b>26.494.521</b>	<b>63,19</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>71.970.741</b>	<b>45.476.220</b>	<b>26.494.521</b>	<b>63,19</b>
2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DAU	71.970.741	45.476.220	26.494.521	63,19
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>54.648.500</b>	<b>31.377.309</b>	<b>23.271.191</b>	<b>57,42</b>



<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>02.06</b>		<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>54.648.500</b>	<b>31.377.309</b>	<b>23.271.191</b>	<b>57,42</b>
3	30	2	02.06	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	DAU	54.648.500	31.377.309	23.271.191	57,42
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>168.845.330</b>	<b>132.845.088</b>	<b>36.000.242</b>	<b>78,68</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>02.02</b>		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>168.845.330</b>	<b>132.845.088</b>	<b>36.000.242</b>	<b>78,68</b>
3	30	4	02.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	DAU	80.790.242	53.532.608	27.257.634	66,26
3	30	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	DAU	88.055.088	79.312.480	8.742.608	90,07
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>321.451.765</b>	<b>302.385.765</b>	<b>19.066.000</b>	<b>94,07</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>02.01</b>		<b>PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>321.451.765</b>	<b>302.385.765</b>	<b>19.066.000</b>	<b>94,07</b>
3	31	2	02.01	5	Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	DAU	321.451.765	302.385.765	19.066.000	94,07
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>45.797.500</b>	<b>41.977.870</b>	<b>3.819.630</b>	<b>91,66</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>45.797.500</b>	<b>41.977.870</b>	<b>3.819.630</b>	<b>91,66</b>

3	31	4	02.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	DAU	45.797.500	41.977.870	3.819.630	91,66
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>136.286.900</b>	<b>91.403.560</b>	<b>44.883.340</b>	<b>67,07</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>02.01</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>24.237.700</b>	<b>18.476.850</b>	<b>5.760.850</b>	<b>76,23</b>
4	01	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	DBH- CHT	24.237.700	18.476.850	5.760.850	76,23
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>02.04</b>		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>112.049.200</b>	<b>72.926.710</b>	<b>39.122.490</b>	<b>65,08</b>
4	01	3	02.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	DBH- CHT	112.049.200	72.926.710	39.122.490	65,08

**1. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2021 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerja.

**2. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2021 tersebut diatas terlihat bahwa ada beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan dengan realisasi sebesar 86,46%
2. Program standarisasi dan perlindungan konsumen dengan realisasi sebesar 63,19%
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan realisasi sebesar 83,09%
4. Program pendidikan dan Latihan koperasi dengan realisasi sebesar 99,08%
5. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan realisasi sebesar 92,23%
6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dengan realisasi sebesar 63,19%
7. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan realisasi sebesar 57,42 %
8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan realisasi sebesar 78,68%
9. Program perencanaan dan pembangunan industry dengan realisasi sebesar 94,07 %
10. Program pengelolaan sistem informasi industry nasional dengan realisasi sebesar 91,66 %
11. Program perekonomian dan pembangunan dengan realisasi sebesar 67,07%

**3. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2021 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada tahun 2021, realisasi program/kegiatan tidak ada yang melebihi target. Semua kegiatan terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Secara fisik realisasi program kegiatan sudah mencapai di atas rata-rata 90% namun untuk realisasi keuangan program kegiatan tidak mencapai target, hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM Kota Pematangsiantar.

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut**

Untuk Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal pada tahun sebelumnya.

B. Realisasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja disajikan sebagaimana dalam Tabel T-C.29 di bawah ini:

TABEL T-C.29

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021

## KOTA PEMATANGSIANTAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Sesuai dengan KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Indikator Kinerja Prog. (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan (s/d 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang dilaksanakan	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	77%
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah register surat masuk dan surat keluar	11100 surat	3400 surat	1700 surat	1700 surat	100%	2000 surat	7100 surat	64%
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
2.11.2.11.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	18 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	16 unit	89%
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	172 unit	70 unit	35 unit	35 unit	100%	32 unit	137 unit	80%



2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	410 jenis	162 jenis	80 jenis	80 jenis	100%	81 jenis	323 jenis	79%
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan cetak dan penggandaan	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	248000 lembar	100.000 lembar	50000 lbr	50000 lbr	100%	40000 lbr	130000 lbr	52%
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	109 unit	36 unit	18 unit	18 unit	100%	25 unit	79 unit	72%
2.11.2.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan penunjang pekerjaan kantor	107 unit	44 unit	15 unit	15 unit	100%	20 unit	79 unit	74%
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	91 kali	40 kali	20 kali	20 kali	100%	18 kali	78 kali	86%
2.11.2.11.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah penugasan dinas dalam dan keluar daerah	411 org/kali	200 org/ kali	100 org/ kali	100 org/kali	100%	75 org/ kali	375 org/ kali	91%
2.11.2.11.01.01.21	Penyediaan jasa pelayanan THL/PNS daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
<b>2.11.2.11.01.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>76%</b>
2.11.2.11.01.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	1 unit	100%
2.11.2.11.01.02	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	14 unit	4 unit	2 unit	0 unit	0%	0 unit	4 unit	28%

2.11.2.11.01	Peningkatan Disiplin Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pakaian khusus hari0hari tertentu	100%	80%	100%	0%	0%	0%	0%	85%
2.11.2.11.01	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya penyediaan pakaian khusus sehari - hari untuk PNS dan THL di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	100 set	85set	100 set	-	0%	0 set	85 set	85%
2.11.2.11.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
2.11.2.11.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran per Triwulan	15 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9 dok	80%
2.11.2.11.01.06.05	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	80%
3.06.2.11.01.15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen/ Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Alat Ukur dan Timbang yang ditera	60%	25%	20%	29%	29%	29%	29%	57%
3.06.2.11.01.15	Pembangunan Laboratorium Kemetrologian dan Sarana Pendukung Lainnya	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Laboratorium Kemetrologian Kota Pematangsiantar	1 gedung	1 gedung	1 gedung	0	0%	1 gedung	1 gedung	100%
3.06.2.11.01.15	Monitoring garam beryodium	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah pelaku usaha	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	0	0%	0	20 pelaku usaha	100%

3.06.2.11.01.15	Pengawasan peredaran cukai ilegal	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah pelaku usaha cukai yang terawasi	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	0	0%	0	50 pelaku usaha	100%
3.06.2.11.01.15	Pelayanan Tera / Tera Ulang Jembatan timbangan dan pompa ukur SPBU serta tangki ukur mobil	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur timbang, takar dan perlengkapan lainnya yang terdata	4681 unit	1000 unit	1000 unit	890	89%	1000 unit	2890 unit	86%
3.06.2.11.01.15	Audit internal dan kaji ulang manajemen mutu	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Laporan audit internal dan kaji ulang manajemen mutu	15 lap	3 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	9 lap	60%
3.06.2.11.01.15	Bantuan alat - alat timbangan kepada pedagang pasar dwikora dan pedagang pasar horas. Timbangan 10 kg sebanyak 50 buah	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah orang yang mendapat bantuan alat ukur timbang	75 orang	-	25 orang	0	0%	25 orang	25 orang	9%
3.06.2.11.01.15	Pendataan alat - alat ukur timbang, takar dan perlengkapan di Kota P. Siantar	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat ukur timbang, takar dan perlengkapan lainnya yang terdata	210 unit	40 unit	-	0	0%	40 unit	80 unit	39%
3.06.2.11.01.15	Sidang Tera Ulang / Pengawasan UTTP	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Alat UTTP yang di Tera / Tera Ulang (dalam hal untuk tertib ukuran)	4681 unit	1000 unit	1000 unit	890	89%	1000 unit	2890 unit	86%
3.06.2.11.01.15	Pengawasan alat UTTP dipasar - pasar tradisional	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan alat UTTP yang standart dipasar tradisional	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
3.06.2.11.01.15.35	Pelatihan reparir / service alat ukur timbangan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah reparir alat ukur timbangan yang terlatih	120 orang	20 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	20 orang	17%

3.06.2.11.01.15	Sosialisasi tentang Label Halal pada produk makanan dan minuman	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang label halal pada produk makanan dan minuman	170 orang	50 orang	0 orang	0	0%	50 orang	100 orang	58%
3.06.2.11.01.15	Sosialisasi penguatan dan pemberdayaan resi gudang	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penguatan dan pemberdayaan resi gudang	170 orang	-	50 orang	0	0%	0	0	0%
3.06.2.11.01.15.34	Sosialisasi tentang Kemetrolagian Legal kepada Masyarakat dan Pengusaha (UU No.2 Tahun 1981) dan Kaitannya dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Pembinaan dan pengendalian Pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah pelaku sausaha yang mengikuti sosialisasi	150 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0%	0	50 orang	30%
<b>2.11.2.11.01.18</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian/ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>45%</b>
2.11.2.11.01.18	Sosialisasi Undang-undang Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	355 orang	50 orang	-	-	0%	0	50 orang	0%
2.11.2.11.01.18.10	Perayaan Hut Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti HUT Koperasi	355 orang	100 orang	0 orang	0 orang	100%	50 orang	150 orang	42%

2.11.2.11.01.18.32	Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SMA/ SMK/ Pesantren	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba tangkas terampil koperasi	355 orang	100 orang	50 orang	50 orang	100%	150 orang	250 orang	78%
2.11.2.11.01.18.29	Pemantauan Pengelolaan Pengguna Dana Bantuan Sosial dan Dana Bergulir bagi Pemerintah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Koperasi berbadan hukum dan UMKM yang difasilitasi pembiayaan	170 orang	30 orang	30 orang	19 orang	63%	30 orang	79 orang	48%
2.11.2.11.01.18	Pemutahiran Data Koperasi dan UMKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Data koperasi yang terdaftar	710 unit	310 unit	155 unit	-	0%	0 unit	465 orang	44%
2.11.2.11.01.18	Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	500 orang	100 orang	100 orang	-	0%	100 orang	200 orang	20%
2.11.2.11.01.18	Bimbingan Teknis Pelaksanaan RAT Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	270 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	150 orang	85%
2.11.2.11.01.18.31	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus/ Pengelola dan Manager Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi	270 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0%	50 orang	100 orang	38%
2.11.2.11.01.18	Monitoring koperasi, akta pendirian koperasi, penilaian koperasi dan pembuatan koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Data koperasi	270 orang	50 orang	-	-	0%	50 orang	100 orang	38%



2.11.2.11.01.18	Pelatihan Standar Akuntansi Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan standar akuntansi koperasi	500 orang	100 orang	50 orang	40 orang	80%	100 orang	240 orang	48%
2.11.2.11.01.18.30	Bimbingan dan Audit Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek audit koperasi	270 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	150 orang	56%
<b>2.11.2.11.01.16</b>	<b>Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Industri/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri</b>		<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>
2.11.2.11.01.16	Peningkatan produk kemasan makanan ringan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah UKM yang mendapat sosialisasi dan pembinaan tentang kemasan makanan ringan	260 ukm	50 ukm	50 ukm	0	0%	50 ukm	100 ukm	38%
2.11.2.11.01.16	Peningkatan Kualitas Produksi melalui Fasilitasi Sertifikasi, Merk dan Desain Produk serta Pengembangan Sarana	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah UKM yang mendapat sosialisasi dan pembinaan tentang sertifikasi, merk dan desain produk	260 ukm	50 ukm	50 ukm	0	0%	50 ukm	100 ukm	38%
2.11.2.11.01.16	Monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang diberikan kepada UMKM	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah UKM yang termonitoring dan terawasi	260 ukm	50 ukm	50 ukm	0	0%	50 ukm	100 ukm	38%
2.11.2.11.01.16	Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI dan SNI Komoditas Unggulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi HAKI dan SNI bagi Komoditas Unggulan	260 ukm	50 ukm	50 ukm	0	0%	50 ukm	100 ukm	38%

2.11.2.11.01.16	Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/ Sentra Usaha Mikro melalui Pembangunan Gedung (Gallery) Promosi Komoditi Unggulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah gedung promosi	1 gedung	-	1 gedung	0	0%	1 gedung	1 gedung	100%
2.11.2.11.01.16.25	Pelatihan Marketing dan Transaksi secara online dan pengembangan UMKM Digital	<b>PENGEMBANGAN UMKM/ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan marketing dan transaksi online dan pengembangan UMKM digital	155 UKM	50 UKM	50 UKM	40 UKM	80%	40 UKM	130 ukm	84%
'Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi											
2.11.2.11.01.16.26	Peringatan Hari Ulos	<b>PENGEMBANGAN UMKM/ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan hari ulos	500 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	400 orang	80%
		'Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi									
2.11.2.11.01.16.23	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri/ Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah pameran yang dilakukan	10 pameran	4 pameran	2 pameran	0 pameran	100%	2 pameran	4 pameran	40%



2.11.2.11.01.16	Sosialisasi Pemberian izin UMKM	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)/ Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)/ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataa, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberian izin UMKM	210 UMKM	40 UMKM	-	0	0%	40 UKM	80 ukm	39%
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
2.11.2.11.01.16.20	Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM melalui pelatihan dan pemberian bantuan peralatan	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	275 UKM	50 UKM	50 UKM	0	0%	50 UKM	100 ukm	36%
3.07.2.11.01.16	<b>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Sentra Industri yang terbentuk</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>69%</b>
3.07.2.11.01.16	Pengembangan Alat Pendeteksi Bahan Pengawet	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Tersedianya alat pendeteksi dan Jumlah makanan yang mengandung bahan berbahaya	100 IKM	50 IKM	50 IKM	0	0%	50 IKM	100 ukm	50%
3.07.2.11.01.16	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Koordinasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Ikm	300 IKM	100 IKM	100 IKM	0	0%	100 IKM	200 IKM	67%

3.07.2.11.01.16.18	Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro Bidang Souvenir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	250 IKM	50 IKM	50 IKM	0 IKM	0%	50 IKM	150 IKM	60%
3.07.2.11.01.16	Peningkatan mutu/ kualitas dan diversifikasi tenun/ ulos	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	250 IKM	50 IKM	50 IKM	0	0%	50 IKM	100 IKM	40%
3.07.2.11.01.16.38	Partisipasi peserta dekranasda luar kota dan dalam kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan dekranasda	4 keg	2 keg	1 keg	0 keg	0%	0 keg	2 keg	50%
3.07.2.11.01.16.37	Pemberian Bantuan mesin dan peralatan pengolahan pembuatan sepatu	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Jumlah IKM yang mebgikuti Pelatihan dan Jumlah bantuan yang diberikan	25 unit	5 unit	5 unit	0 unit	0%	0 unit	5 unit	20%
3.07.2.11.01.16	Peningkatan kualitas/ mutu produk divertifikasi kerajinan anyaman	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan diversifikasi kerajinan anyaman	200 orang	40 orang	40 orang	0	0%	0 orang	40 orang	20%
3.07.2.11.01.16.35	Pelatihan pertukangan pembuatan meubel	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertukangan pembuatan meubel dan bantuan peralatan	200 orang	-	50 orang	0 orang	100%	0	0 orang	0%
3.07.2.11.01.16	Pemberian bantuan perkuatan usaha bagi pelaku UMKM/ Pemberian fasilitas sarana prasarana	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Jumlah UKM yang mendapat bantuan sarana	500 orang	200 orang	100 orang	0 orang	100%	0 orang	200 orang	40%
3.07.2.11.01.16	Penetapan produk unggulan	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Perda tentang produk daerah	1 perda	-	1 perda	0	100%	0	0	0%

3.07.2.11.01.16	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	<b>PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI/ Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah pameran dalam dan luar negeri	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	78%
	Promosi dari pasar produk koperasi dan usaha kecil menengah	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah pameran yang dilakukan	8 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	100%	2 Pameran	6 pameran	75%
3.07.2.11.01.16.36	Pameran Industri seni kerajinan dan perdagangan (INACRAFT)	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah pameran yang dilakukan	5 Pameran	2 Pameran	1 Pameran	1 Pameran	100%	1 Pameran	4 pameran	80%
3.07.2.11.01.18	<b>Penataan Struktur Industri</b>	<b>PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL/ Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Updating data IKM</b>	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3.07.2.11.01.18.04	Pemutahiran data industri	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Upgrade database usaha industri di Kota Pematangsiantar	5 database	1 daabase	1 database	1 database	100%	1 database	2 database	40%
3.07.2.11.01.18.05	Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok serta pemberian sertifikat/ kode registrasi mesin pelinting rokok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah mesin pelinting rokok yang teregister dan bersertifikat	68 unit	68 unit	68 unit	0 unit	100%	68 unit	68 unit	100%

3.06.2.11.01.18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<b>STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING/ Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		100%	75%	67%	67%	67%	67%	67%	70%
3.06.2.11.01.18	Monitoring dan informasi harga sembako dan barang penting lainnya	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten/Kota	Monitoring Harga dan distribusi barang kebutuhan pokok terkendali	1800 kali	720 kali	360 kali	360 kali	100%	360 kali	1440 kali	80%
3.06.2.11.01.18.12	Pasar murah menghadapi hari raya idul fitri dan natal 2017	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan apasar murah	10 kali	4 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	8 kali	80%
3.06.2.11.01.18	Peningkatan SDM dalam persaingan Perdagangan Bebas	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi	150 orang	50 org	50 orang	0	0%	0	50 orang	50%
3.06.2.11.01.21	<b>Penataan Struktur Perdagangan</b>	<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN/ Penerbitan Izn Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3.06.2.11.01.21.01	Pemutahiran data perdagangan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	data usaha perdagangan di Kota Pematangsiantar	5 data	2 data	1 data	1 data	100%	1 data	4 data	80%





		<b>Kota</b>									
1.06.2.11.01.25.05	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, Serta Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelatihan yang dilakukan	11 pelatihan	3 Pelatihan	5 Pelatihan	0 Pelatihan	0%	3 pelatihan	6 pelatihan	54%
1.06.2.11.01.25.06	Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan	65 keg	5 keg	-	0	0%	5 keg	10 keg	15%

**1. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2021 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada program tidak memenuhi target kinerja, yaitu :

**2. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2021 tersebut diatas terlihat bahwa ada beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan
2. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
4. Program pendidikan dan Latihan koperasi
5. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
7. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
9. Program perencanaan dan pembangunan industry
10. Program pengelolaan sistem informasi industry nasional
11. Program perekonomian dan pembangunan

**3. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2021 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2021 tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- a. Meningkatkan produktivitas, Perindustrian dan Perdagangan secara signifikan dan berkelanjutan (sustainable);

- b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Perindustrian dan Perdagangan dan peningkatan kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Pematangsiantar;
- d. Meningkatkan proporsi dari sudut jumlah usaha kecil menengah, dan usaha kecil dengan laju pertumbuhan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan jumlah unit usaha;
- e. Meningkatkan sinergi lintas pelaku dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Terwujudnya Perdagangan yang sehat yang dikelola secara professional dan mandiri;
- g. Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat;
- h. Meningkatkan akses perdagangan ke berbagai sumber yang dianggap produktif;
- i. Meningkatkan kelembagaan koperasi yang sehat;
- j. Menguatkan para UMKM dengan permodalan yang kuat dari koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
- k. Meningkatkan citra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di kalangan masyarakat.

#### **6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut**

Untuk Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri khususnya barang lokal, agar barang lokal dapat menjadi andalan daerah dan dapat bertahan sebagai produk lokal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Nawacita.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Program pembangunan Kota Pematangsiantar diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui pengembanganusaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi di Kota Pematangsiantar adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan di Kota Pematangsiantar. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro. Hasil-hasil pembangunan sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan tercermin dari indikator makro seperti : PDRB, persen pertumbuhan koperasi, persen peningkatan kemitraan, pertumbuhan volume usaha, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor koperasi dan UKM dalam 5 tahun terakhir ini terutama dalam Perkembangan Koperasi dan Renja Tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. UKM adalah menunjukkan trend yang meningkat dengan perubahan rata-rata setiap tahunnya 2,95%. Koperasi yang aktif serta koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan, kondisi ini antara lain disebabkan kesibukan pengurus, kekurangan seriusan pengurus ataupun kekurangan kemampuan pengurus. Sektor industri mengalami peningkatan dengan bertambahnya IKM di Kota Pematangsiantar. Adanya IKM binaan menunjukkan kepedulian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar terhadap para pengrajin dan para wirausaha baru agar lebih kreatif dan berinovasi sehingga berdaya saing. Penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi para pencari pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan produktif.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dapat disajikan pada Tabel T-C.30 sebagai berikut:



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Kota Pematangsiantar**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perdagangan	SOP Nomor: 800/625/DKUP/VI/2017	- Tersedianya Pasar Tradisional	5	6	7	8	5	7	7	7	8	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	SOP Nomor: 800/625/DKUP/VI/2017	- Presentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	3860	1.198	1.198	1.198	3.756	890	890	3.346	1.098	
			- Pengujian & Sertifikasi Tera/ tera ulang	350	355	355	355	338	338	338	345	350	
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar	SOP Nomor: 800/625/DKUP/VI/2017	- Jumlah industri kecil	553	556	560	565	668	447	696	565	700	
			- Jumlah industri menengah	25	26	27	27	13	13	12	12	12	
			- Jumlah Industri besar	7	7	8	8	4	4	5	5	5	
4	Meningkatnya pengelolaan koperasi		- jumlah koperasi	390	400	410	420	369	84	86	111	114	
			- Jumlah UKM	18638	18638	18638	18638	17865	956	12.622	26.869	26.000	
5	Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel	SOP Nomor: 800/625/DKUP/VI/2017	-Indeks reformasi birokrasi	40%	50%	50%	50%	0	0	0	55%	57%	
			- Memiliki Website dan melakukan updating	1	1	1	1	0	0	0	1	1	
7	Terciptanya kualitas pelayanan publik yang prima	SOP Nomor: 800/625/DKUP/VI/2017	- Indeks Kepuasan Masyarakat	30%	40%	45%	50%	0	0	0	42%	55%	

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2018 (%)	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019(%)	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020	ANGGARAN PENDUKUNG TAHUN 2020	NAMA PROGRAM ANGGARAN PENUNJANG
1	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	4	5	125%	4	5	125%	5	7	140%	0,00	Program Penataan Struktur Perdagangan
3	Jumlah Industri kecil	Unit	553	668	124%	553	447	81%	553	696	125%	84.952.000	Program Penataan Struktur Industri
4	Jumlah Industri Menengah	Unit	25	14	52%	25	13	52%	13	12	92%		
5	Jumlah Industri Besar	Unit	7	4	57%	7	4	57%	4	5	125%		
6	Jumlah Koperasi (Aktif)	Unit	390	369	94%	390	84	84%	100	86	86%	634.054.336	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7	Jumlah UKM	Unit	18.638	17.865	95%	1.000	956	95%	10000	12.622	126%	568.999.062	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar setiap tahunnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pelayanan dibidang koperasi, konsultasi industri maupun pelayanan perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya peningkatan kualitas pasar, Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi yang semakin aktif, Peningkatan Volume Koperasi, serta meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan sertifikat koperasi berprestasi baik. Untuk lebih menginsentifkan pelayanan publik, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan senantiasa melakukan koordinasi baik dengan pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

### 2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Adapun permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar antara lain:

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Refocusing anggaran akibat wabah covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian indikator kinerja tidak maksimal.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kegiatan yang bersifat monitoring tetap dilaksanakan walaupun tidak memiliki anggaran biaya</li><li>2. Tera/ Tera Ulang alat UTTP pada UPTD Kemetrolgian tetap dijalankan tanpa adanya anggaran kegiatan</li></ol>
2.	Gejolak harga dan kelangkaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya akibat wabah covid-19 menimbulkan kenaikan harga.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan monitoring terhadap distributor-distributor besar di Kota Pematangsiantar</li><li>2. Melakukan koordinasi terhadap daerah lain sebagai penghasil kebutuhan pokok yang langka di pasar</li><li>3. Melakukan kegiatan Pasar Murah 2 kali setahun</li></ol>
3.	Kurangnya SDM pada UPTD Metrologi dan UPTD Dana Bergulir menghambat kinerja pada UPTD tersebut;	Penambahan jumlah personil dan peningkatan SDM dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan



4.	Banyaknya calon peminjam (Koperasi dan UKM) yang tidak memenuhi syarat sebagai peminjam dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang ada;	Melakukan Pembinaan bagi Koperasi dan UKM
5.	Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dikarenakan pengurus tidak mempunyai jiwa wirausaha, pembentukan koperasi di masa lalu yang lebih baik dikarenakan keinginan dari pemerintah (top down) bukan dari bawah (bottom down).	Penumbuhan iklim usaha yang kondusif dengan menciptakan keberpihakan dan peluang usaha sebesar-besarnya untuk mewujudkan Koperasi dan UKM menjadi lebih produktif dan berdaya asing.
6.	Pengembangan Potensi para IKM tidak dapat dilakukan maksimal dikarenakan Refocusing anggaran	Tetap melakukan pendampingan melalui kegiatan Dekranasda
7.	Masih ditemukannya barang ilegal dan barang yang mengandung bahan berbahaya beredar di masyarakat	Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi dan kementerian terkait peredaran barang dan jasa di masyarakat

### 2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional

Program/Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar senantiasa mendukung Program Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan visi dan misi. Pembinaan kewirausahaan, perkoperasian dan pelatihan industri kepada masyarakat dapat mendukung visi Walikota yakni “Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”. Pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mendukung misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, yakni :

1. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan Koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang berdampak masa pandemic dan atau pasca pandemic covid-19;
2. Memperkuat sentralitas dan daya Tarik kota, guna pencapaian siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara;

Kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat, juga senantiasa menjadi perhatian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Salah satu diantaranya adalah adanya kegiatan penyelenggaraan pasar murah serta pelatihan keterampilan industri rumah tangga yang ditujukan kepada masyarakat miskin/kurang mampu. Diharapkan agar kegiatan ini mampu mendukung program pengentasan kemiskinan.

#### **2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD**

Tantangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

1. Rendahnya kualitas SDM Aparatur
2. Tingginya beban kerja tidak didukung dengan jumlah aparatur
3. Semakin tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, baik modal, sarana prasarana maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan
4. Tingginya target capaian pada RENSTRA dan RPJMD
5. Penilaian masyarakat tentang kinerja aparatur

Peluang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

1. Ketersediaan dana anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan pendidikan diklat
2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kontrak kerja untuk mengukur kinerja aparatur dan bersifat mengikat
3. Adanya dukungan dana baik dari Tk. Propinsi maupun Tk. Pusat
4. Adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahunnya demi mendukung ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

#### **2.4. Review Terhadap RKPD**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebelum menentukan Program kegiatan yang akan diusulkan dalam Perincian Plafond Anggaran Sementara (PPAS), terlebih dahulu membandingkan RKPD dengan hasil musrenbang kabupaten dan berupaya menumbuhkan program kegiatan SKPD yang mampu mendukung program pemerintah pusat. Disamping itu Dinas Koperindag juga mengkaji program/kegiatan yang benar-benar paling dibutuhkan oleh masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan.

Proses membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan agar program kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat pada khususnya dan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar pada umumnya.

Hasil analisis terhadap kegiatan hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada Tabel T-C.31 berikut:

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Pemerintah Kota Pematangsiantar**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Keg	Indikator Keg	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>7.155.841.126</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>7.343.500.000</b>	
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>120.000.000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>140.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen	4 dok	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen	4 dok	35.000.000	

						Daerah					
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen	1 Dok	30.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen	1 Dok	35.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhstisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen	4 Lap	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhstisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen	4 Lap	35.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen	8 Lap	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen	8 Lap	35.000.000	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.642.341.126</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>5.730.000.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskopu kmdag	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	50 orang	5.617.341.126	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskopuk mdag	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	50 orang	5.700.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	13.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	3 Dok	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen	3 Dok	17.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>573.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>621.000.000</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskopu kmdag	Jumlah Paket Komponen Instansi L:istri/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskopuk mdag	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	4 paket	16.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopu kmdag	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopuk mdag	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	95.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskopu kmdag	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskopuk mdag	Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskopu kmdag	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskopuk mdag	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	18.000.000	
	Penyediaan cetak	Diskopu	Jumlah Paket Barang	4 paket		Penyediaan cetak dan	Diskopuk	Jumlah Cetakan dan	4 paket		

	dan penggandaan	kmdag	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		60.000.000	penggandaan	mdag	Penggandaan yang disediakan		65.000.000	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diskopu kmdag	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	350.000.000	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diskopuk mdag	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi SKPD (Dalam/ Luar Daerah)	110 lap	380.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskopu kmdag	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dok	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskopuk mdag	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1550 Dok	27.000.000	



	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>329.000.000</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>348.500.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Diskopu kmdag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Diskopuk mdag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Lap	6.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskopu kmdag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskopuk mdag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	47.000.000	
	Penyediaan jasa Peralatan dan	Diskopu	Jumlah Laporan	4		Penyediaan jasa Peralatan	Diskopuk	Jumlah Laporan	4 Lap		

	Perlengkapan Kantor	kmdag	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28.000.000	dan Perlengkapan Kantor	mdag	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskopu kmdag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskopuk mdag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Lap	265.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>186.500.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>190.000.000</b>	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopu kmdag	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	186.500.000	Pengadaan Mebel	Diskopuk mdag	Jumlah unit mebel yang disediakan	14 unit	190.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>305.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>314.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskopu kmdag	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	80.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskopuk mdag	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	10 unit	85.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopu kmdag	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	25 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopuk mdag	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	25 Unit	34.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskopu kmdag	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	195.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskopuk mdag	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	195.000.000	
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN</b>			<b>10%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN</b>			<b>10%</b>	<b>70.000.000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah</b>			<b>10%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah</b>			<b>10%</b>	<b>70.000.000</b>	

	Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	50 unit usaha	65.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	P.Siantar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	50 unit usaha	70.000.000		

			Kab/ Kota			dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab/ Kota			
	<b>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>			<b>10%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>			<b>10%</b>	<b>80.000.000</b>	
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>10%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>10%</b>	<b>80.000.000</b>	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/	P.Siantar	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	225 unit usaha	75.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi	P.Siantar	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	50 unit usaha	80.000.000	

	Kota		Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kwenangan Kab/ Kota			Kewenangan Kab/ Kota		Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kwenangan Kab/ Kota			
	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>			<b>10%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>			<b>10%</b>	<b>85.000.000</b>	
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota</b>			<b>10%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota</b>			<b>10%</b>	<b>85.000.000</b>	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	P.Sianta r	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian	50 unit usaha	80.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	P.Siantar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian	50 unit usaha	85.000.000	

	Kabupaten/Kota		Kesehatan			Kabupaten/Kota		Kesehatan			
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>			<b>20%</b>	<b>785.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>			<b>20%</b>	<b>895.000.000</b>	
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>20%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>20%</b>	<b>550.000.000</b>	
	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	P.Siantar	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 orang	500.000.000	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	P.Siantar	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 orang	550.000.000	



<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>20%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>20%</b>	<b>250.000.000</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	P.Siantar	Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	200.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	P.Siantar	Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	200 orang	250.000.000				
<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>					<b>20%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>20%</b>	<b>95.000.000</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta	P.Siantar	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan	50 Pelaku Usaha	85.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	P.Siantar	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan	50 palaku usaha	95.000.000				

	Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		dan pelatihan			UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		dan pelatihan			
	<b>PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			<b>5%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			<b>5%</b>	<b>90.000.000</b>	
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5%</b>	<b>90.000.000</b>	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	P. Siantar	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitas dana bergulir	35 Unit Usaha	85.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	P. Siantar	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitas dana bergulir	35 unit usaha	90.000.000	

	Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota					Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota					
	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>			<b>20%</b>	<b>330.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>			<b>20%</b>	<b>350.000.000</b>	
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			<b>20%</b>	<b>330.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			<b>20%</b>	<b>350.000.000</b>	
	Pendataan Potensi dan pengembangan	P.	Jumlah Data Potensi dan	1 Dok		Pendataan Potensi dan	P. Siantar	Jumlah Data Potensi dan	1 Dok		

	Usaha Mikro	Siantar	Pengembangan Usaha Mikro		80.000.000	pengembangan Usaha Mikro		Pengembangan Usaha Mikro		85.000.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah UMKM yang difasilitasi (Fasilitasi HAKI dan SNI )	40 unit usaha	85.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah UMKM yang difasilitasi (Fasilitasi HAKI dan SNI )	40 unit usaha	90.000.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	40 unit usaha	80.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	40 unit usaha	85.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	P. Siantar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	40 orang	85.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	P. Siantar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	40 orang	90.000.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			<b>20%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			<b>20%</b>	<b>140.000.000</b>	
	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>			<b>20%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>			<b>20%</b>	<b>140.000.000</b>	

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25 unit usaha	125.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25 unit usaha	140.000.000	
<b>PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>20%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>20%</b>	<b>210.000.000</b>	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20%</b>	<b>210.000.000</b>	

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	P. Siantar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jumlah media informasi	400 orang dan 8 unit	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	P. Siantar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jumlah media informasi	400 orang dan 8 unit	210.000.000	
<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	
<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Ditingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Ditingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	
Pemeriksaan Penyimpanan	P.	Jumlah Laporan	4		Pemeriksaan Penyimpanan	P. Siantar	Jumlah	4 laporan		

	Bahan Berbahaya	Siantar	Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	laporan	80.000.000	Bahan Berbahaya		gudang		90.000.000	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	P. Siantar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	4 laporan	50.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2	P. Siantar	Jumlah bahan yang di awasi	4 laporan	55.000.000	



			maupun Produsen B2 (P-B2)			(P-B2)					
	<b>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>15%</b>	<b>1.160.000.000</b>	<b>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>15%</b>	<b>3.165.000.000</b>	
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>1 unit</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>1 unit</b>	<b>3.000.000.000</b>	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	185 unit	1.000.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	185 unit	3.000.000.000	
	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya</b>			<b>10%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya</b>			<b>10%</b>	<b>165.000.000</b>	

	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dok	160.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Gudang dan tempat penyimpanan distribusi barang yang di awasi	2 Dok	165.000.000	
	<b>Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>			<b>4%</b>	<b>485.000.000</b>	<b>Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>			<b>4%</b>	<b>510.000.000</b>	
	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>				<b>80.000.000</b>	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>			<b>50 Unit Usaha</b>	<b>85.000.000</b>	

	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	P. Siantar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	80.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	P. Siantar	Jumlah Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat	4 laporan	85.000.000	
	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>			<b>50 Unit Usaha</b>	<b>345.000.000</b>	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>			<b>50 Unit Usaha</b>	<b>360.000.000</b>	

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	P. Siantar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	365 laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat	365 laporan	110.000.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	P.Siantar	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	2 laporan 4 Laporan	245.000.000	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	P.Siantar	Jumlah Kegiatan Pasar Murah Menghadapi	2 laporan 4 Laporan 4 Laporan	250.000.000	

	Khusus		Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		hari besar keagamaan			
			Jumlah Laporan Monitoring Pengumpulan Informasi Barang yang dilekati cukai			Jumlah Laporan Monitoring Pengumpulan Informasi Barang yang dilekati cukai					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Bersama Bea			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Bersama Bea					

			Cukai			Cukai					
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>65.000.000</b>	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	P. Siantar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 laporan	60.000.000	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	P. Siantar	Jumlah Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat	4 laporan	65.000.000	
	<b>Pengembangan Ekspor</b>			<b>5%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Pengembangan Ekspor</b>			<b>5%</b>	<b>550.000.000</b>	

<b>Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>				<b>5%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>			<b>5%</b>	<b>550.000.000</b>	
Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	500.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	550.000.000		
<b>Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>				<b>10%</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>			<b>10%</b>	<b>1.205.000.000</b>	
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>				<b>8000 UTTP</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>			<b>8000 UTTP</b>	<b>1.205.000.000</b>	
Pelaksanaan Metrologi Legal	P.Siantar	Jumlah kegiatan	3 keg	800.000.000	Pelaksanaan Metrologi	P.Siantar	Jumlah kegiatan	3 keg	950.000.000		

	berupa Tera, Tera Ulang					Legal berupa Tera, Tera Ulang					
			Pembangunan Lab Kemetrolgia n dan sarana pendukung lainnya	1 Lab	400.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Pembangunan Lab Kemetrolgia n dan sarana pendukung lainnya	1 Lab	450.000.000	
			Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang	8000 unit	300.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	P.Siantar	Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapan nya yang ditera/ tera ulang	8000 unit	350.000.000	



			Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan e-retribusi	1 Paket	100.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan e-retribusi	1 Paket	150.000.000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Jumlah kegiatan Pengawasan	3 keg	250.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Jumlah kegiatan Pengawasan	3 keg	255.000.000	
			Jumlah pelaku usaha elpiji, timbangan emas dan barang dalam keadaan terbungkus	50 Pelaku Usaha	90.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	P.Siantar	Jumlah pelaku usaha elpiji, timbangan emas dan barang dalam keadaan	50 Pelaku Usaha	95.000.000	

			(BDKT)					terbungkus (BDKT)			
			Bantuan alat-alat timbangan	100 unit	80.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Bantuan alat-alat timbangan	100 unit	80.000.000	
			Laporan audit internal dan interkomparasi surat keterangan kemampuan vereifikasi ineternal	3 Lap & 2 surat ket	80.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Laporan audit internal dan interkomparasi surat keterangan kemampuan vereifikasi ineternal	3 Lap & 2 surat ket	80.000.000	
	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				<b>215.000.000</b>	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				<b>235.000.000</b>	

<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>					<b>215.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>					<b>235.000.000</b>
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	30 UMKM	130.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	30 UMKM	145.000.000		
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5 UMKM	85.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5 UMKM	90.000.000		

			Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			Kota		Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			
<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>					<b>600.000.000</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>					<b>620.000.000</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota</b>					<b>600.000.000</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota</b>					<b>620.000.000</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok		200.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/	P.Siantar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok		210.000.000

						Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	410.000.000	
	<b>Pengendalian Izin Usaha Industri</b>				<b>85.000.000</b>	<b>Pengendalian Izin Usaha Industri</b>				<b>90.000.000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin</b>				<b>85.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin</b>				<b>90.000.000</b>	

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota					Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha	4 Dok	85.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan	4 Dok	90.000.000

			Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota					Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota			
	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>1 Data</b>		<b>120.000.000</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>1 Data</b>		<b>130.000.000</b>			
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Data</b>		<b>120.000.000</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Data</b>		<b>130.000.000</b>			

	<p>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>P.Siantar</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>4 Dok</p>	<p>65.000.000</p>	<p>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>P.Siantar</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>	<p>4 Dok</p>	<p>70.000.000</p>	
--	--	------------------	---	--------------	-------------------	--	------------------	--	--------------	-------------------	--



								(SIINas)			
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dok	55.000.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dok	60.000.000	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>13.245.841.126</b>					<b>15.913.500.000</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penganggaran, tentunya banyak usulan-usulan yang menyangkut kepentingan kelompok tertentu, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, usulan SKPD Pemerintah Kota kepada SKPD Tk. Propinsi, dll. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemberian pelatihan kepada masyarakat
2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana perdagangan
3. Pemberian bantuan sarana perindustrian
4. Pemberian bantuan modal kepada masyarakat, koperasi dan UMKM

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Pematangsiantar dapat di sajikan pada tabel T-C.32 di bawah ini:

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kota Pematangsiantar**

**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

No (1)	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/ Volume (5)	Catatan (6)
I 1	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b> Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kec. Siantar Martoba, siantar selatan, siantar barat, siantar utara	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan UMKM	40 orang	<b>Musrenbang</b>
II 2	<b>Program Pengembangan UMKM</b> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Kec. Siantar Sitalasari, siantar timur, siantar martoba, siantar barat, siantar marimbun	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UMKM	100 orang	<b>Musrenbang</b>
III 3	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b> Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kec. Siantar barat, siantar timur	Pemberian pelatihan tenun dan bantuan peralatan	10 orang	<b>Musrenbang</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi pengelola sentra dan organisasi klaster. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga

perlu diperkuat melalui perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat menjadi avalis atau oftaker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2022-2027 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:
  - a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

- b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
  - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;
2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
- a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
  - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2016-2021, UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas;
2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor perindustrian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar; dan
6. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar anggotanya.

Keenam permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2.1. Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut adalah Sektor perdagangan, sektor perindustri memberikan kontribusi meningkatnya PDRB, UMKM yang berdaya saing dan Koperasi yang mandiri

### **3.2.2. Sasaran**

1. Meningkatnya pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM;
2. Meningkatnya kinerja perdagangan daerah;
3. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha;
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.

## **3.3. Program dan Kegiatan**

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2022, tentunya tidak lepas dari Program/kegiatan yang telah direncanakan pada RENSTRA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang disinkronisasikan dengan hasil musrembang Kec/Kel. Disamping itu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga mengacu pada Program kerja Pemerintah Pusat agar mengedepankan Program kegiatan yang mampu menanggulangi pengentasan kemiskinan serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Diharapkan program kegiatan yang direncanakan ini mampu mendukung tercapainya visi misi Kepala Daerah Kota Pematangsiantar. Jumlah Program yang akan dilaksanakan sebanyak 12 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 Kegiatan. Kegiatan ini diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 13.245.841.126,- yang berasal dari dana APBD Kota, Rp. 11.245.841.126,- sumber dana APBN sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ kota
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota.
4. Program Penilaian KSP/ USP Koperasi
  - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah KEanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota.
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/ Kota.
  - Pendidikan dan Latihan UKM dalam Daerah KAb/ Kota
  - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah kab/ kota
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/ kota.
7. Program Pengembangan UMKM
  - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
  - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
9. Program Penunjang urusan pemerintahan
  - Administrasi kepegawaian perangkat daerah

10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
  - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat DAerah Kab/ Kota
11. Program Sarana Distribusi Perdagangan
  - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
  - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
12. Program Stabilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kab/ kota
  - Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kab/ Kota
  - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/ kota
13. Program Pengembangan Ekspor
  - Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kab/ Kota
14. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
  - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota
16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  - Penyediaan informasi industry untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota
17. Program Penggunaan dan Pemasaraan Produk Dalam Negeri
  - Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
18. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
  - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan KAb/ Kota

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang dilaksanakan	Diskoperi ndag	1 Tahun	7.155.841.126	DAU		1 Tahun	7.343.500.000
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskoperi ndag	5 Dok	120.000.000	DAU		5 Dok	140.000.000
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Diskoperi ndag	4 Dok	30.000.000	DAU		4 Dok	35.000.000

2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskoperi ndag	1 Dok	30.000.000	DAU		1 Dok	35.000.000
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Diskoperi ndag	4 Laporan	30.000.000	DAU		4 laporan	35.000.000
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ	Diskoperi ndag	8 Laporan	30.000.000	DAU		8 Laporan	35.000.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskoperi ndag	1 Tahun	5.642.341.126	DAU		1 Tahun	5.730.000.000
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	Diskoperi ndag	50 orang	5.617.341.126	DAU		50 orang	5.700.000.000

<b>2.17.01.2.02.07</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</b>	<b>Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>3 Dok</b>	<b>25.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 Dok</b>	<b>30.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>573.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>621.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06.01</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>Jumlah Paket Komponen Instansi L:istri/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>4 paket</b>	<b>15.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 paket</b>	<b>16.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>5 paket</b>	<b>90.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5 paket</b>	<b>95.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>4 paket</b>	<b>18.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 paket</b>	<b>20.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>4 paket</b>	<b>15.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 paket</b>	<b>18.000.000</b>

		<b>disediakan</b>							
<b>2.17.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan cetakan dan penggandaan</b>	<b>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>4 paket</b>	<b>60.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 paket</b>	<b>65.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>100 laporan</b>	<b>350.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>110 lap</b>	<b>380.000.000</b>
<b>2.17.01.2.06.10</b>	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>1500 Dok</b>	<b>25.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1550 Dok</b>	<b>27.000.000</b>
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>186.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>190.000.000</b>
<b>2.17.01.2.07.06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</b>	<b>Diskoperi dag</b>	<b>14 unit</b>	<b>186.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>14 unit</b>	<b>190.000.000</b>

<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>329.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>348.500.000</b>
<b>2.17.01.2.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat menyurat</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>3000 laporan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3000 Lap</b>	<b>6.500.000</b>
<b>2.17.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>36 laporan</b>	<b>45.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>36 Lap</b>	<b>47.000.000</b>
<b>2.17.01.2.08.03</b>	<b>Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>28.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Lap</b>	<b>30.000.000</b>
<b>2.17.01.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>72 laporan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>72 Lap</b>	<b>265.000.000</b>
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Rutin Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>305.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>314.000.000</b>

	<b>Daerah</b>								
<b>2.17.01.2.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>10 unit</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>10 unit</b>	<b>85.000.000</b>
<b>2.17.01.2.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipeliharaan</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>25 unit</b>	<b>30.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>25 Unit</b>	<b>34.000.000</b>
<b>2.17.01.2.09.09</b>	<b>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</b>	<b>Diskoperi ndag</b>	<b>1 unit</b>	<b>195.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 unit</b>	<b>195.000.000</b>
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>70.000.000</b>



	<b>USAHA SIMPANPINJAM</b>	<b>Pinjam</b>							
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>70.000.000</b>
<b>2.17.02.2.01.01</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>50 unit usaha</b>	<b>65.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50 unit usaha</b>	<b>70.000.000</b>

<b>2.17.03</b>	<b>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi yang aktif</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>80.000.000</b>
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>80.000.000</b>
<b>2.17.03.2.01.01</b>	<b>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kwenangan Kab/ Kota</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>225 unit usaha</b>	<b>75.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50 unit usaha</b>	<b>80.000.000</b>
<b>2.17.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>85.000.000</b>

<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan kesehatan koperasi KSP dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>85.000.000</b>
<b>2.17.04.2.01.01</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>50 unit usaha</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50 unit usaha</b>	<b>85.000.000</b>
<b>2.17.05</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>785.000.000</b>	<b>DAK Non Fisik dan DAU</b>		<b>25%</b>	<b>895.000.000</b>

<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>DAK Non Fisik dan DAU</b>		<b>25%</b>	<b>550.000.000</b>
<b>2.17.05.2.01.01</b>	<b>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</b>	<b>Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>150 orang</b>	<b>500.000.000</b>	<b>DAK Non Fisik dan DAU</b>		<b>150 orang</b>	<b>550.000.000</b>
<b>2.17.05.2.02</b>	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ukm yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAK Non Fisik dan DAU</b>		<b>25%</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.17.05.2.02.01</b>	<b>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan</b>	<b>Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>100 orang</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>200 orang</b>	<b>250.000.000</b>

	<b>Kompetensi SDM UKM</b>								
<b>2.17.05.2.03</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase usaha mikro yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAK Non Fisik dan DAU</b>		<b>25%</b>	<b>95.000.000</b>
<b>2.17.05.2.03.01</b>	<b>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>50 Pelaku Usaha</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50 palaku usaha</b>	<b>95.000.000</b>
<b>2.17.06</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang berkualitas</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>5%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>10%</b>	<b>90.000.000</b>
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>5%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>10%</b>	<b>90.000.000</b>

2.17.06.2.01.01	<b>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelmbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota</b>	P.Siantar	35 Unit Usaha	85.000.000	DAU		35 unit usaha	90.000.000
2.17.07	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah UMKM yang difasilitasi perijinan</b>	P. Siantar	20%	330.000.000	DAU		30%	350.000.000

<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dan fasilitasi</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>330.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30%</b>	<b>350.000.000</b>
<b>2.17.07.2.01.01</b>	<b>Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>1 Dok</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Dok</b>	<b>85.000.000</b>
<b>2.17.07.2.01.05</b>	<b>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah UMKM yang fasilitasi (Fasilitasi HAKI dan SNI )</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>40 unit usaha</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>40 unit usaha</b>	<b>90.000.000</b>
<b>2.17.07.2.01.04</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>40 unit usaha</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>40 unit usaha</b>	<b>85.000.000</b>

		<b>Mikro</b>							
<b>2.17.07.2.01.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro</b>	<b>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>40 orang</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>40 orang</b>	<b>90.000.000</b>
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah UMKM Naik Kelas</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30%</b>	<b>140.000.000</b>
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase peningkatan usaha dari skala usaha menjadi usaha kecil</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30%</b>	<b>140.000.000</b>
<b>2.17.08.2.01.01</b>	<b>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>25 unit usaha</b>	<b>125.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>25 unit usaha</b>	<b>140.000.000</b>



	<b>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</b>	<b>Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</b>							
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>P. Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30%</b>	<b>210.000.000</b>
<b>3.30.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Masyarakat taat terhadap peraturan perundangan tentang cukai</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>35%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>36%</b>	<b>210.000.000</b>
<b>2.17.01.2.05.10</b>	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jumlah media informasi</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>400 orang dan 8 unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>400 orang dan 8 unit</b>	<b>210.000.000</b>
<b>3.30.02</b>	<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>

		<b>Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>							
<b>3.30.02.2.06</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota Pematangsiantar</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>20%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>25%</b>	<b>145.000.000</b>
<b>3.30.02.2.06.01</b>	<b>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>4 laporan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 laporan</b>	<b>90.000.000</b>
<b>3.30.02.2.06.03</b>	<b>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi,</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>4 laporan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 laporan</b>	<b>55.000.000</b>

	<b>Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</b>	<b>Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</b>							
<b>3.30.03</b>	<b>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Presentase Pasar Daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>15%</b>	<b>1.160.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>3.165.000.000</b>
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>1 unit</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 unit</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>3.30.03.2.01.01</b>	<b>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>185 unit</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>185 unit</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>10%</b>	<b>165.000.000</b>

<b>3.30.03.2.02.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>2 Dok</b>	<b>160.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>2 Dok</b>	<b>165.000.000</b>
<b>3.30.04</b>	<b>Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				<b>485.000.000</b>				<b>510.000.000</b>
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Laporan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 laporan</b>	<b>85.000.000</b>
<b>3.30.04.2.01.03</b>	<b>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 laporan</b>	<b>85.000.000</b>

<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Unit Usaha</b>	<b>P. Siantar</b>		<b>345.000.000</b>	<b>DAU</b>			<b>360.000.000</b>
<b>3.30.04.2.02.01</b>	<b>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang</b>	<b>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>365 laporan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>365 laporan</b>	<b>110.000.000</b>
<b>3.30.04.2.02.03</b>	<b>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak pada pelaku usaha distribusi barang</b>	<b>- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota '- Jumlah Laporan Monitoring</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>2 laporan 4 Laporan 4 Laporan</b>	<b>245.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>2 laporan 4 Laporan 4 Laporan</b>	<b>250.000.000</b>

		<b>Pengumpulan Informasi Barang yang dilekati cukai '- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Bersama Bea Cukai</b>							
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 laporan</b>	<b>65.000.000</b>
<b>3.30.04.2.03.03</b>	<b>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>4 laporan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 laporan</b>	<b>65.000.000</b>
<b>3.30.05</b>	<b>Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase serapan resi gudang</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>5%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5%</b>	<b>550.000.000</b>

<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan ekspor produk unggulan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>5%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5%</b>	<b>550.000.000</b>
<b>3.30.05.2.01.02</b>	<b>Pameran Dagang Nasional</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>500.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5 pelaku usaha</b>	<b>550.000.000</b>
<b>3.30.06</b>	<b>Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Presentase peningkatan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>10%</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>DAU dan DAK</b>		<b>10%</b>	<b>1.205.000.000</b>
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Wajib Tera Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP)</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>8000 Unit</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>DAU dan DAK</b>		<b>8000 Unit</b>	<b>1.205.000.000</b>
<b>3.30.06.2.01.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi</b>	<b>Jumlah Alat Ukur, Alat</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>3502</b>		<b>DAK</b>		<b>3502 unit</b>	

	<b>Legal berupa Tera, Tera Ulang</b>	<b>Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</b>		<b>unit</b>	<b>800.000.000</b>	<b>&amp; DAU</b>			<b>950.000.000</b>
		<b>Pembangunan Lab Kemetrologian dan sarana pendukung lainnya</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>1 unit</b>	<b>400.000.000</b>	<b>DAK &amp; DAU</b>		<b>1 unit</b>	<b>450.000.000</b>
		<b>Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>3500 unit</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3500 unit</b>	<b>350.000.000</b>
		<b>Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan e-retribusi</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>1 unit</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 unit</b>	<b>150.000.000</b>
<b>3.30.06.2.01.02</b>	<b>Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>50 orang</b>	<b>250.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50 orang</b>	<b>255.000.000</b>
		<b>Jumlah pelaku usaha elpiji, timbangan emas dan barang dalam keadaan terbungkus</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>50 orang</b>	<b>90.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50 orang</b>	<b>95.000.000</b>



		<b>(BDKT)</b>							
		<b>Bantuan alat-alat timbangan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>100 unit</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 unit</b>	<b>80.000.000</b>
		<b>Laporan audit internal dan interkomparasi surat keterangan kemampuan verifikasi ineternal</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>3 Lap &amp; 2 surat ket</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 Lap &amp; 2 surat ket</b>	<b>80.000.000</b>
<b>3.30.07</b>	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>P. Siantar</b>		<b>215.000.000</b>				<b>235.000.000</b>
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase peningkatan hasil penjualan produk unggulan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>5%</b>	<b>215.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5%</b>	<b>235.000.000</b>
<b>3.30.07.2.01.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>30 UMKM</b>	<b>130.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30 UMKM</b>	<b>145.000.000</b>

<b>3.30.07.2.01.02</b>	<b>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>5 UMKM</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5 UMKM</b>	<b>90.000.000</b>
<b>3.31.02</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Jumlah Sentra Industri yang terbentuk</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>1 Sentra</b>	<b>600.000.000</b>	<b>DAU &amp; DBH- CHT</b>		<b>1 sentra</b>	<b>620.000.000</b>
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota</b>	<b>Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>DAU &amp; DBH- CHT</b>		<b>1</b>	<b>620.000.000</b>
<b>3.31.01.2.01.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>1 Dok</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Dok</b>	<b>210.000.000</b>

<b>3.31.01.2.01.05</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>400.000.000</b>	<b>DAU &amp; DBH-CHT</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>410.000.000</b>
<b>3.31.03</b>	<b>Pengendalian Izin Usaha Industri</b>		<b>P.Siantar</b>		<b>85.000.000</b>			<b>1 Data</b>	<b>90.000.000</b>
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>Presentasi penerbitan IUI, IPUI, IPKI dan IUKI yang diterbitkan</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>3%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3%</b>	<b>90.000.000</b>

<b>3.31.03.2.01.01</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>4 Dok</b>	<b>85.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Dok</b>	<b>90.000.000</b>
<b>3.31.04</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Jumlah Updating data IKM</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>1 Data</b>	<b>120.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Data</b>	<b>130.000.000</b>
<b>3.31.04. 2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan</b>	<b>Jumlah Updating data IKM</b>	<b>P.Siantar</b>	<b>1 Dok</b>	<b>120.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 Dok</b>	<b>130.000.000</b>

	<b>Kabupaten/Kota</b>								
<b>3.31.04. 2.01.01</b>	<b>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>4 Dok</b>	<b>65.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Dok</b>	<b>70.000.000</b>
<b>3.31.04. 2.01.02</b>	<b>Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIInas</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis IndustriKabupaten/Kota Melalui SIInas</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>4 Dok</b>	<b>55.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Dok</b>	<b>60.000.000</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>13.245.841.126</b>				<b>15.913.500.000</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan pemerintah kota. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel T-C.33. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Selain itu, pada Tabel T-C.33 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar yang mendukung sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar pada misi pembangunan daerah nomor 4 yaitu Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi antara lain:

1. Sumber Dana DAK : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Sumber Dana DAK-Non Fisik : Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.

3. Sumber Dana DAU : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota, Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota, Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran serta Desain dan Teknologi, Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

## BAB IV PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rancangan Renstra 2023-2027 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemko Pematangsiantar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan pembangunan jangka pendek di bidang koperasi dan UMKM.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, ditingkat Provinsi maupun Kab/ Kota. Selain itu, Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (kecamatan dan kelurahan) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini. Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian renja ini disusun dan semoga bermanfaat untuk membina kelompok usaha kecil, menengah dan besar. Untuk perbaikan dan penyempurnaan rencana ini kami mengharapkan bantuan berupa saran dan masukan dan diucapkan terima kasih.

Pematangsiantar, Mei 2022  
Plt. Kepala Dinas Koperasi,  
UKM dan Perdagangan Kota  
Pematangsiantar



**HERBET ARUAN, S.Pd., MH**  
Nip. 19710215 199305 1 001